

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

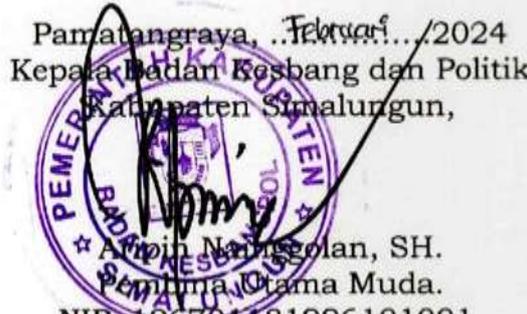


**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya , penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 yang disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Realisasi Kinerja yang berorientasi pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2012-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun ini telah diupayakan selengkap mungkin, namun demikian tidak terlepas dari kekurangan baik dari penyajian maupun substansi data, untuk itu hasil evaluasi laporan kinerja ini selain memberikan gambaran pencapaian kinerja juga sebagai media evaluasi bagi seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun untuk dapat meningkatkan kinerja.

Pematangraya, .. Februari .. 2024
Kepala Badan Kesbang dan Politik
Kabupaten Simalungun,

Armin Nanggolan, SH.
Semangat, Otama Muda.
NIP. 196701181996101001.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Gambaran umum Perangkat Daerah.....	4
D. Isu Strategis.....	7
E. Pohon Kinerja.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Visi Pembangunan Tahun 2021-2026.....	10
B. Misi Pembangunan Tahun 2022-2026.....	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	30
Tahun 2023	
C. Realisasi Anggaran/Capaian Kinerja Keuangan.....	35
BAB IV PENUTUP.....	41

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKIP atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2023 disusun guna memenuhi prinsip *accountability* (akuntabilitas), kemampuan untuk menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pokok yang dibebankan kepadanya karena dinilai cakap (*proper*) secara bersih dan berwibawa. LKIP dapat digunakan sebagai bahan meningkatnya efisiensi, efektivitas dan produktivitas dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Simalungun dalam mencapai visinya melalui program dan kegiatan, untuk mewujudkan terciptanya stabilitas daerah yang mantab, dinamis dan kondusif.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Simalungun ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 adalah **“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”**, dengan prioritas pembangunan penciptaan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai prinsip-prinsip *good governance* yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki visi strategis dalam penegakkan dan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Kabupaten Simalungun dirumuskan di dalam 10 misi yaitu :

1. Pemulihan ekonomi
2. Pemulihan kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clear Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Ada beberapa kondisi yang menjadi perhatian khusus dan menjadi tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya :

1. Adanya gejala sikap dan perilaku warga masyarakat yang menggambarkan memudarnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, Falsafah Negara dan Pemersatu Bangsa.
2. Dalam hal kebebasan pers, kebebasan untuk mengemukakan pendapat serta kebebasan untuk berserikat dan berkumpul memberikan sosial segar untuk pembentukan LSM oleh masyarakat.
3. Kerawanan-kerawanan sosial seperti tingginya angka (PEKAT) seperti narkoba, perjudian, prosistusi, miras dan sebagainya yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat.
4. Kemungkinan timbulnya huru-hara, baik sebagai akibat fenomena alam maupun akibat ulah manusia.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Substansi dari Sistem AKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya, dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*).

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan LKIP Tahun 2023 antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Simalungun;
2. Memberikan gambaran dan Informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
3. Meningkatkan komitmen dan kerja sama yang baik dengan Instansi terkait maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, hingga pada evaluasi kinerja;
4. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan tingkat kekurangan capaian kinerja atas pelaksanaan program atau kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun;
5. Meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat)

B. DASAR HUKUM

Adapun Dasar hukum yang menjadi acuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tetang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten Dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun.

C. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun merupakan unsur penunjang pemerintah daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun mempunyai tugas membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan pembinaan dan penumbuhan rasa kesatuan bangsa.

a. Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas Pokok di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan urusan pemerintahan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan untuk pemantapan idologi bangsa dan integritas bangsa.
2. Perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategis dan politik.
3. Perumusan kebijakan pembinaan wawasan kebangsaan.
4. Perumusan kebijakan pembinaan hubungan antara lembaga masyarakat.

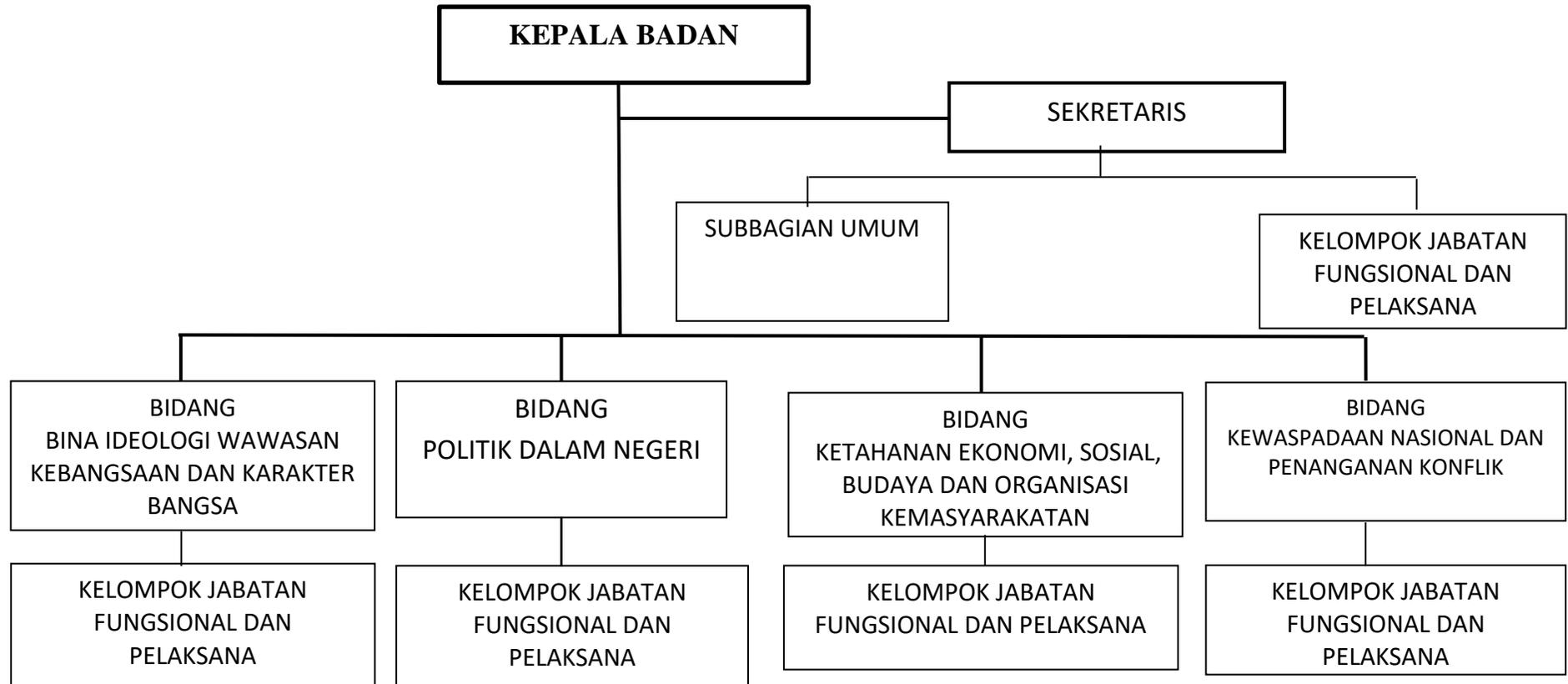
5. Perumusan kebijakan pembinaan kesiagaan, antisipasi terjadinya huru hara dan kerawanan sosial
6. Perumusan kebijakan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
7. Pengelola ketatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Simalungun.

c. Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor: 06 Tahun 2016, dan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan
- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Umum
 - Perencana
 - Analis Keuangan Daerah Ahli Muda
- c) Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
- d) Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
- e) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
- f) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kab.Simalungun :



D. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang diangkat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan visi misi Bupati adalah dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun untuk , yaitu :

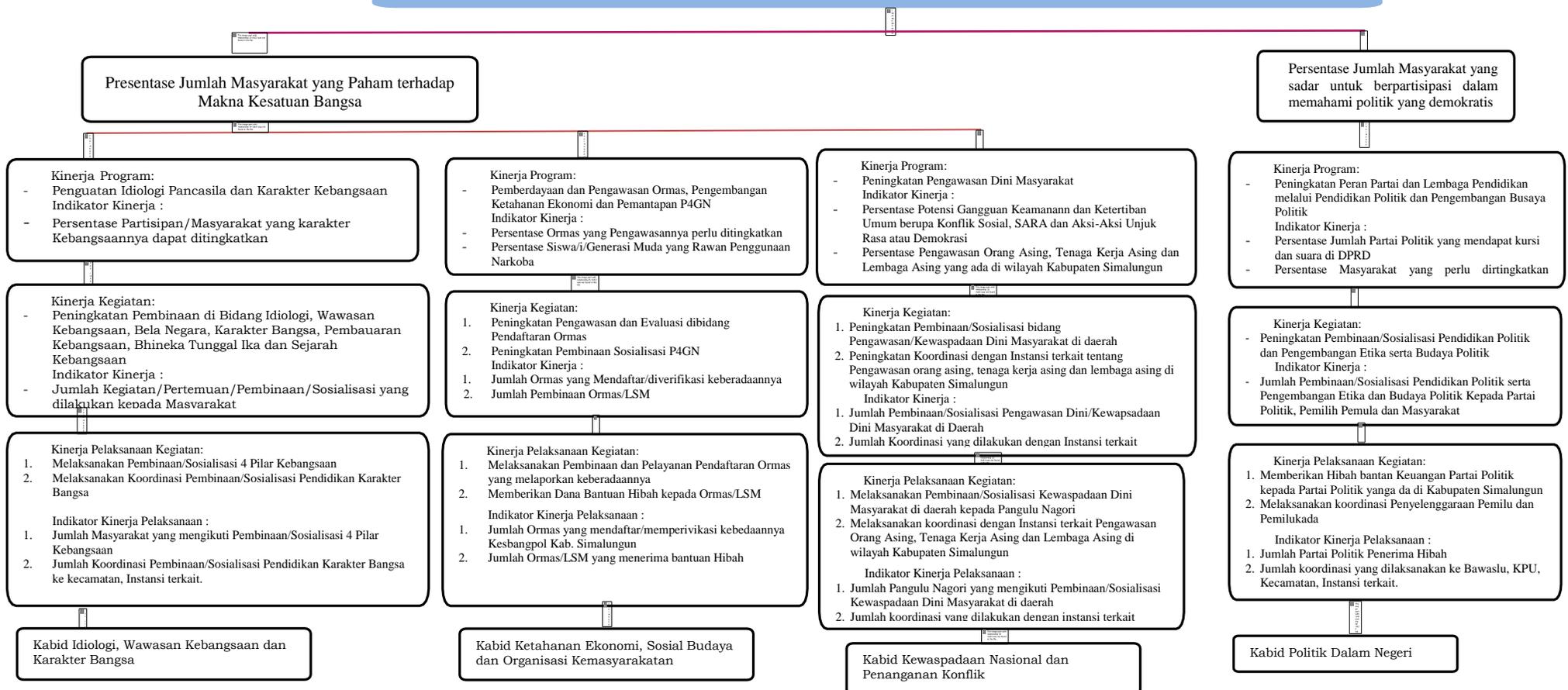
1. **Kondusivitas Wilayah** : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah;
2. **Toleransi** : Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa;
3. **Demokrasi** : Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
4. **Politik** : Meningkatkan Kehidupan Politik yang Demokratis.

E. POHON KINERJA

Pohon Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun sebagaimana terlihat di bawah ini

VISI . RAKYAT HARUS SEJAHTERA
MISI 3 . Penerapan GCG (Good and Clear Government)

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Simalungun yang Kondusif, Demokratis dan Partisipatif



F. Sistematika Pembahasan

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan Utama (strategic issue) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi antara lain yaitu :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran/Capaian Kinerja Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja:

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan di lakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran (Perjanjian Kinerja)

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Pembangunan Tahun 2021 - 2026

“Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat.

Visi Pembangunan Kabupaten Simalungun yang ditetapkan tahun 2021-2026 adalah : **“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”**.

Sedangkan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun disusun sebagai berikut : **“Terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera, berbudaya, berkepribadian dan demokratis”**.

B. Misi Pembangunan Tahun 2021 - 2026

Misi Kabupaten Simalungun dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 ditetapkan dalam 10 misi :

1. Pemulihan ekonomi
2. Pemulihan kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clear Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi Untuk mewujudkan Misi tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun mempunyai Misi sebagai berikut :
 - a. Memperkokoh Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bangsa.
 - b. Mewujudkan Sistem Politik yang Demokratis dan beradab.

- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			TUJUAN/SASARAN	TUJUAN/SASARAN
1	2	3	4	7
1	Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik yang Demokratis	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap makna kesatuan bangsa	A. Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	80
			1. Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	81
		Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memahami politik yang demokratis	2. Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	79

2. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.

Adapun Program/Kegiatan, Indikator, Pendanaan Indikatif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dengan sumber dana dari DAU dan PAD Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Program/Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Targ et	Pagu	
				Sebelum Perubahan (Rp)	Sebelum Perubahan (Rp)
I.	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			5.850.995.889	6.254.929.944
1.1	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		3.259.000	0
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 lapor an	3.259.000	0
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.597.364.451	3.863.061.974
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 oran g/bu lan	4.587.587.451	3.855.079.974
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lapor an	3.259.000	3.991.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan	1 lapor an	3.259.000	3.991.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**Tahun
2023**

		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3.259.000	0
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.358.849.950	1.702.247.050
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	360.901.000	515.539.000
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	105.167.400	100.822.200
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	74.997.600	104.683.600
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 paket	90.547.950	239.366.250
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	0	5.000.000
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	727.236.000	736.836.000
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 laporan	133.246.000	184.569.000
1.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	70.006.000	105.009.000
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	63.240.000	79.560.000
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			208.268.588	206.273.920

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**Tahun
2023**

1.5.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	142.268.588	134.273.920
1.5.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	66,000,000	72.000.000
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			290.969.000	298.778.000
1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	69.080.000	85.500.000
1.6.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	11.168.000	13.208.000
1.6.3.	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	205.200.000	200.070.000
1.6.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	10 unit	5.521.000	0
II.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			1.901.161.000	34.002.641.000
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,			1.901.161.000	34.002.641.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**Tahun
2023**

	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.				
2.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	11 orang	1.901.161.000	1.901.161.000
2.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	0	32.101.480.000
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		1 Laporan	600.000.000	600.000.000
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 1	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 laporan	600.000.000	600.000.000
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan	312 orang	600.000.000	600.000.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**Tahun
2023**

	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah			
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			1.000.000.000	541.320.000
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Laporan	1.000.000.000	541.320.000
5.1.1	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1.000.000.000	541.320.000
TOTAL				10.093.117.989	41.398.890.944

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tahun 2023 mendeskripsikan pengukuran capaian tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kab. Simalungun Tahun 2021-2024. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kab. Simalungun Tahun 2023, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Di dalam bab ini, pembahasan akuntabilitas kinerja dilengkapi dengan pembahasan akuntabilitas keuangan, dimana anggaran yang diterima oleh Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun 2023.

Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisihnya. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan rumus

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
>90	Sangat Baik
75 s/d 89,99	Baik
65 s/d 74,99	Cukup
50 s/d 64,99	Kurang
0 s/d 49,99	Sangat Kurang

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan.

Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Simalungun Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	A. Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	%	80	70	87,50
2	1. Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	%	81	70	86,42
3	2. Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	%	79	70	88,61
Rata - Rata Capaian Kinerja Badan Kesbangpol				87,50%	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2023 pada semua indikator hampir mencapai target, hal ini disebabkan Program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun sudah terlaksana dengan baik, walaupun untuk mencapai target indikator tersebut kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan kegiatan tersebut anggarannya tidak ditampung di APBD untuk Tahun 2023, tetapi dapat dilaksanakan dengan melakukan Monitoring ke Kecamatan dengan melaksanakan Koordinasi.

Capaian kinerja dari setiap program/kegiatan dari tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun anggaran dari program/kegiatan belum terealisasi seluruhnya namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap solid untuk mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja rata – rata untuk keseluruhan indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk ke dalam kategori **Baik (87,50%)**

Tabel 3.1.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	1. Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	%	81	70	86,42

Pada Indikator 1: Capaian Indikator Kinerja Utama pada Indikator I Persentase Masyarakat yang Paham terhadap kesatuan Bangsa memiliki target 81% dengan realisasi 70% mendapatkan capaian kinerja sebesar 86,42%. Dimana dapat disimpulkan masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan politik dapat berjalan dengan dengan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan: penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, yang dilakukan dengan Koordinasi dan Monitoring langsung kepada Camat dan Pangulu yang ada di daerah Kabupaten Simalungun dan juga Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan target 81% maka dapat kita simpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja 1 selama Tahun 2023 sebesar 86,42%.

Berikut ini sebagai Pelaksanaan Kegiatan untuk Mendukung Indikator 1 sebagai berikut:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Sub Kegiatan :

- pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah



Tabel 3.1.1.a

**DAFTAR DATA ORMAS LSM AKTIF
BERDASARKAN PERIODE KEPENGURUSAN**

NO	NAMA ORMAS	PERIODE	STATUS
1	LSM LEMBAGA PEMANATU PEMBANGUNAN DAN ASET REPUBLIK INDONESIA (LSM LPPAS RI) KABUPATEN SIMALUNGUN	2018-2023	AKTIF
2	DEWAN PIMPINAN DAERAH RAKYAT PERMATA NUSANTARA (DPD RPN)	2019-2024	AKTIF
3	PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI) KABUPATEN SIMALUNGUN	2018-2023	AKTIF
4	DEWAN PIMPINAN CABANG GARDA BELA NEGARA NASIONAL (DPC GBNN)	2019-2024	AKTIF
5	DEWAN PIMPINAN CABANG JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL (DPC JPKP)	2019-2024	AKTIF

6	DPC GARDA CAKRA INDONESIA KABUPATEN SIMALUNGUN	2020-2025	AKTIF
7	DEWAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEMBELA KEMERDEKAAN RAKYAT (DPC LSM PAKAR)	2020-2025	AKTIF
8	DPD PEDANG KEADILAN PERJUANGAN KABUPATEN SIMALUNGUN	2020-2025	AKTIF
9	DEWAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN RAKYAT ANTI KORUPSI NKRI (DPC LSM BARAK NKRI)	2020-2023	AKTIF
10	DPC LSM PEMANTAU KINERJA APARATUR NEGARA (DPC LSM PENJARA)	2021-2023	AKTIF
11	DEWAN PIMPINAN CABANG POSKO PERJUANGAN RAKYAT (DPC POSPERA) KABUPATEN SIMALUNGUN	2021-2024	AKTIF
12	TEAM OPERASIONAL PENYELAMATAN ASSET NEGARA REPUBLIK INDONESIA (TOPAN RI)	2021-2026	AKTIF
13	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DEWAN PIMPINAN NASIONAL IKATAN PEMUDA ANAK RAYA (LSM DPN IPAR) KABUPATEN SIMALUNGUN	2021-2026	AKTIF
14	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BHINTARA MUDA WASKITA' 92 (LSM BMW'92) KABUPATEN SIMALUNGUN	2021-2024	AKTIF
15	LEMBAGA PEMANTAU TINDAK PIDANA KORUPSI (LP TIPIKOR) NUSANTARA DEWAN PIMPINAN CABANG KABUPATEN SIMALUNGUN	2022-2025	AKTIF
16	MARKAS CABANG GARDA KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT INDOENESIA KABUPATEN SIMALUNGUN	2022-2025	AKTIF
17	LEMBAGA SWADAYA MASYAKAT LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LSM LIRA)	2022-2025	AKTIF
18	JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (JPKP) KABUPATEN SIMALUNGUN	2022-2027	AKTIF
19	BADAN KOORDINASI MAJELIS ZIKIR (BAKOR MAZ) KABUPATEN SIMALUNGUN	2019-2023	AKTIF
20	GEREJA KATOLIK STASI KATERINA KARLAHAN USANG, PAROKI SANTO	2019-2024	AKTIF

	STEFANUS MARTIR – PEMATANG RAYA KABUPATEN SIMALUNGUN		
21	PENGURUS CABANG MAJELIS PENDETA BUDDHA MAITREYA INDONESIA (MAPAN BUMI) KABUPATEN SIMALUNGUN	2020-2025	AKTIF
22	DPC ASOSIASI PENDETA INDONESIA (INDONESIA PASTOR ASSOCIATION)	2020-2025	AKTIF
23	PENGURUS DAERAH WANITA ISLAM (PDWI) KABUPATEN SIMALUNGUN	2020-2025	AKTIF
24	PUNGUAN PARMALIN DPD KABUPATEN SIMALUNGUN	2019-2023	AKTIF
25	DEWAN MAJID INDONESIA KABUPATEN SIMALUNGUN	2021-2026	AKTIF
26	BADAN KEMAKMURAN MASJID JAMI HIDAYAH	2022-2026	AKTIF
27	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN SIMALUNGUN	2020-2025	AKTIF
28	PENGURUS DPC – API (ASOSIASI PENDETA INDOENSIA) KABUPATEN SIMALUNGUN	2020-2025	AKTIF
29	PERKUMPULAN GERAKAN PENTAKOSTA INDONESIA PEMBAHAMAN (PGPIP)	2020-2025	AKTIF
30	MARKAS CABANG LASKAR MERAH PUTIH INDONESIA (LMPI) KABUPATEN SIMALUNGUN	2020-2025	AKTIF
31	LASKAR MERAH PUTIH PERJUANGAN (LMPP)	2019-2024	AKTIF
32	DEWAN PIMPINAN CABANG PEMUDA KARYA NASIONAL (DPC-PKN) KABUPATEN SIMALUNGUN	2021-2026	AKTIF
33	DPC HIMPUNAN MAHASISWA DAN PEMUDA SIMALUNGUN (HIMAPSI) KABUPATEN SIMALUNGUN	2021-2024	AKTIF
34	DEWAN PIMPINAN CABANG GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (DPC GAMKI)	2021-2024	AKTIF
35	DEWAN PIMPINAN DAERAH IKATAN PEMUDA KARYA (DPD-IPK) KABUPATEN SIMALUNGUN	2021-2026	AKTIF
36	DEWAN PIMPINAN KABUPATEN SIMALUNGUN PEJUANG BATAK BERSATU	2022-2027	AKTIF
37	DEWAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN MAHASISWA DAN PEMUDA SIMALUNGUN (DPP-HIMAPSI)	2021-2024	AKTIF

38	PERKUMPULAN MASYARAKAT ADAT PARBAPAON HOP BANDAR BETSI KABUPATEN SIMALUNGUN	2019-2024	AKTIF
39	PERKUMPULAN PAHOPPOS FORUM PEDULI BUDAYA BATAK NAGORI SILAMPUYANG KABUPATEN SIMALUNGUN	2019-2024	AKTIF
40	DPD PARSADAAN SILALAH RAJA (RAJA TOLPING, BARSOLE RAJA, RAJA BUNGA BUNGA, BORU-BERE-IBEBERE) (PSR BBI)	2018-2023	AKTIF
41	SANGGAR SENI DAN BUDAYA SIMALUNGUN "BHATARA GURU SIN DOLOG"	2020-2025	AKTIF
42	DPC HIMPUNAN MASYARAKAT NIAS INDONESIA (DPC-HIMNI) KABUPATEN SIMALUNGUN	2020-2024	AKTIF
43	KOMUNITAS GIRSANG MILINEAL (KGM) DEWAN PIMPINAN CABANG KABUPATEN SIMALUNGUN	2021-2024	AKTIF
44	DEWAN PIMPINAN DAERAH SIMALUNGUN GENERASI PEDULI BUDAYA BANGSO BATAK (DPD SIMALUNGUN GP3B)	2021-2026	AKTIF
45	PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DOHOT BORUNA (PPTSB) CABANG 2 KABUPATEN SIMALUNGUN	2022-2026	AKTIF
46	BUNDO KANDUANG KABUPATEN SIMALUNGUN	2021-2025	AKTIF
47	DEWAN PENGURUS PUSAT ORGANISASI SIRAJA BATAK KABUPATEN SIMALUNGUN	2022-2027	AKTIF
48	PERKUMPULAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN BINTANG SIMALUNGUN (PPKSBB)	2021-2026	AKTIF
49	IKATAN ALUMNI SMT/ SMK PERTANIAN NEGERI KABUPATEN SIMALUNGUN	2021-2024	AKTIF
50	DEWAN PENGURUS CABANG PERSAUDARAAN PELAKU DAN PEMERHATI PIJAT REFLEKSI INDONESIA (PER-P4RI) KABUPATEN SIMALUNGUN	2021-2026	AKTIF
51	PAGUYUPAN PETANI, PETERNAK & PEDAGANG DESA-DESA SEKITAR BUKIT MARAJA KABUPATEN SIMALUNGUN (PEGARADJA)	2022-2027	AKTIF

52	DEWAN PIMPINAN CABANG IKATAN PENULIS DAN JURNALIS INDONESIA SIANTAR SIMALUNGUN (DPC – IPJI)	2021-2026	AKTIF
53	DEWAN PENGURUS CABANG PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (DPC – PPDI)	2022-2027	AKTIF
54	IKATAN CENDIKAWAN SIMALUNGUN (IKTCS)	2021-2024	AKTIF
55	DWEAN PIMPINAN CABANG PERSATUAN WARTAWAN REPUBLIK INDONESIA (DPC-PWRI) KABUPATEN SIMALUNGUN	2021-2024	AKTIF
56	PENGURUS KABUPATEN SIMALUNGUN PERSATUAN PURNAWIRAWAN TNI ANGKATAN DARAT (PPAD)	2020-2025	AKTIF
57	PENGURUS BEDENG DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL. PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN INDONESIA (PBD-DPN-PERKASA) KABUPATEN SIMALUNGUN	2019-2024	AKTIF
58	DWEAN PIMPINAN CABANG ASOSIASI WARTAWAN PROFESIONAL INDONESIA (DPC-AWPI)	2019-2024	AKTIF
59	HIMPUNAN PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INDONESIA (HIMPAUDI)	2021-2025	AKTIF
60	IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI) KABUPATEN SIMALUNGUN	2021-2025	AKTIF
61	DEWAN PENGURUS CABANG PERKUMPULAN PARA PEMIJAT PENYEHATAN INDONESIA (P-AP3I) KABUPATEN SIMALUNGUN	2020-2025	AKTIF
62	PERKUMPULAN KELOMPOK DUKUNGAN SEBAYA SIMALUNGUN SUPPORT	2019-2024	AKTIF
63	DPC SIMALUNGUN PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESIA	2020-2025	AKTIF
64	DEWAN PIMPINAN DAERAH SUMATERA UTARA HIMPUNAN PUTRA PUTRI KELUARGA ANGKATA DARAT (DPD SUMUT HIPAKAD)	2020-2025	AKTIF

65	PEKERJA ANAK BANGSA INDONESIA KABUPATEN SIMALUNGUN KABUPATEN - BATU BARA	2019-2024	AKTIF
66	DEWAN PIMPINAN PUSAT KELOMPOK PERIKANAN DARAT "MAJU BERSAMA"	2019-2024	AKTIF
67	PIMPINAN RESORT SIMALUNGUN MAPAN INDONESIA (MASYARAKAT PEDULI ANTI NARKOBA)	2019-2023	AKTIF
68	DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA – KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPC-F.SPTI- K.SPSI) KABUPATEN SIMALUNGUN	2018-2023	AKTIF
69	DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN GERAKAN RAKYAT ANTI NARKOBA (GRANAT)	2019-2024	AKTIF
70	YAYASAN PESANTREN QUR'AN ELTAHFIDH	2018-2023	AKTIF

Sumber Data : dari Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota



Sumber Data : Pelaksanaan Forkopimda dari Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Tabel 3.1.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	2. Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	%	79	70	88,61

Pada Indikator 2: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 yaitu Persentase Pemahaman Politik Masyarakat memiliki Target 79% dengan realisasi 70% sehingga dapat disimpulkan capaian indikator kinerja sebesar 88,61%. Indikator Kinerja Utama 2 “Persentase Pemahaman Politik Masyarakat” tercapai dengan baik dikarenakan Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait dan dengan didukung oleh Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan Sub Kegiatan: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan: penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, yang dilakukan dengan Koordinasi dan Monitoring langsung kepada Camat dan Pangulu yang ada di daerah Kabupaten Simalungun terkait Koordinasi situasi Politik di Kecamatan.

Capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2 mencapai sebesar 88,61% yang didukung dengan Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.



Tabel 3.1.2.a

**DAFTAR : NAMA PARTAI YANG MENERIMA BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Kursi Tahun 2019	Perolehan Suara Sah Tahun 2019	Besaran Bantuan / 1 Suara (Rp.)	Jumlah Bantuan Yang Diterima Jan-Des (12 Bulan) (Rp.)
1.	Partai Golongan Karya	9	83.109	4.000	332.436.000
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	83.047	4.000	332.188.000
3.	Partai Demokrat	7	64.515	4.000	258.060.000
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	54.179	4.000	216.716.000
5.	Partai Nasional Demokrat	5	47.051	4.000	188.204.000
6.	Partai Hati Nurani Rakyat	4	29.504	4.000	118.016.000
7.	Partai Perindo	4	27.367	4.000	109.468.000
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2	20.860	4.000	83.440.000
9.	Partai Persatuan Pembangunan	2	18.893	4.000	75.572.000
10.	Partai Amanat Nasional	2	17.196	4.000	68.784.000
11.	Partai Berkarya	1	6.861	4.000	27.444.000
JUMLAH		50	452.582		1.810.328.000

Sumber data : Dari Bidang Politik Dalam Negeri Kabupaten Simalungun

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Pedoman untuk merealisasikan bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Jumlah Partai Politik yang telah memenuhi ketentuan dapat terealisasikan 100% dikarenakan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD sebanyak 11 Partai Politik.

**B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL
TAHUN 2023**

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran evaluasi dan analisis kinerja hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	A. Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	%	78	59,45	76,21	80	70	87,50
2	1. Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	%	80	64,15	80,18	81	70	86,42
3	2. Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	%	76	59,75	72,03	79	70	88,61

Pada Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja diatas dapat kita dilihat bahwa pada capaian Tahun 2023 Sangat baik, tetapi masih sangat membutuhkan proses pengerjaan kegiatan hasil capaian indikator : Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa mencapai 86,42% pada indikator kinerja: Persentase Pemahaman Politik Masyarakat mencapai 88,61%, dengan

demikian hasil akhir dari penilaian capaian indikator Perangkat daerah. Capaian Kinerja Rata-Rata untuk keseluruhan indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk kedalam kategori **Baik (87,50%)**.

Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sudah mengalami peningkatan capaian kinerja utama sasaran strategis pada tahun 2023 sebesar 11,29%.

Tabel 3.2.1
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2023
dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
2	1. Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	%	80	64,15	80,18	81	70	86,42

Pada Indikator 1: pada Sasaran Strategis Indikator Utama Masyarakat yang Paham terhadap kesatuan Bangsa pada Tahun 2022 memiliki target 80% dengan realisasi 64,15% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 80,15%. Sedangkan pada Tahun 2023 memiliki target 81% dengan realisasi 70% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 6,42%. Dapat kita lihat Perbandingan pada indikator ini mengalami Peningkatan yang signifikan sebesar 6, 27%. Agar Lebih Meningkatkan Capaian Kinerja Strategis pada Tahun 2024 yang akan datang maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merencanakan Program Sosialisasi/Pembinaan kepada Masyarakat Simalungun tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat serta Sosialisasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan.

Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	1. Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	%	76	59,75	72,03	79	70	88,61

Pada Indikator 2: pada Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Persentase Pemahaman Politik Masyarakat pada Tahun 2022 memiliki target 76% dengan realisasi 59,75% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 76,21%. Sedangkan pada Tahun 2023 memiliki target 79% dengan realisasi 70% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 88,61%. Dapat kita lihat Perbandingan pada indikator ini mengalami Peningkatan yang signifikan sebesar 16,58%. Agar Lebih Meningkatkan Capaian Kinerja Strategis pada Tahun 2024 yang akan datang maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merencanakan Program Sosialisasi/Pembinaan kepada Masyarakat Simalungun terkait Etika Budaya Politik dan Koordinasi dengan Instansi terkait.

Tabel 3.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Tujuan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	A. Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	%	78	59,45	76,21	80	70	87,50

Pada Indikator A: pada Capaian Kinerja Utama Tujuan Strategis Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun

2022 memiliki target 78% dengan realisasi 59,45% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 76,21%. Sedangkan pada Tahun 2023 target 80% dengan realisasi 70% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 87,50%. Dapat kita lihat Perbandingan pada indikator ini mengalami Peningkatan yang signifikan sebesar 11,29%. Capaian Kinerja Utama Utama Tujuan diatas merupakan Penggabungan Capaian Kinerja Utama Strategis Sasaran 1 dan Capaian Kinerja Utama Strategis Sasaran 2. Rata-Rata untuk keseluruhan indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk kedalam kategori **Baik (87,50%)**.

**Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2023 Dengan Dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2026)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(5)
1	A. Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	%	80	70	87,50	84
2	1. Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	%	81	70	86,42	85
3	2. Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	%	79	70	88,61	84

Pada Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja diatas dapat kita dilihat bahwa pada capaian Tahun 2023 Sangat baik telah melebihi target yang ditetapkan di Akhir Renstra (Tahun 2026). pada Indikator Tujuan Persentase Masyarakat Yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik telah melebihi target sebesar 3,50%, pada Indikator Sasaran 1 yaitu Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa melebihi target sebesar 1,42 dan pada Indikator Sasaran 2 Persentase Pemahaman Politik Masyarakat melebihi Target 4,61.

Walaupun demikian masih harus ditingkatkan agar Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun yaitu Persentase Masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik Yang Demokratis dapat Terwujud.

Tabel 3.3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Indikator Sasaran 1 Tahun 2023 Dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(5)
1	1. Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	%	81	70	86,42	85

Pada Tabel 3.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Utama Indikator Sasaran 1 diatas dapat kita lihat bahwa pada capaian Tahun 2023 Sangat baik telah melebihi target yang ditetapkan di Akhir Renstra (Tahun 2026) yaitu Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa melebihi target sebesar 1,42%.

Walaupun demikian masih harus ditingkatkan agar Indikator Sasaran 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun yaitu Masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dapat lebih diwujudkan.

Tabel 3.3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Indikator Sasaran 2 Tahun 2023 Dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(5)
1	2. Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	%	79	70	88,61	84

Pada Tabel 3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja diatas dapat kita lihat bahwa pada capaian Tahun 2023 Sangat baik telah melebihi target yang ditetapkan di Akhir Renstra (Tahun 2026) yaitu pada Indikator Sasaran 2 Persentase Pemahaman Politik Masyarakat melebihi Target 4,61.

Tabel 3.3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Indikator Tujuan Tahun 2023
Dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(5)
1	A. Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	%	80	70	87,50	84

Pada Tabel 3.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja diatas dapat kita lihat bahwa pada capaian Tahun 2023 Sangat baik telah melebihi target yang ditetapkan di Akhir Renstra (Tahun 2026). pada Indikator Tujuan Persentase Masyarakat Yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik telah melebihi target sebesar 3,50%,

Walaupun demikian masih harus ditingkatkan agar Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun yaitu Persentase Masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik Yang Demokratis dapat Terwujud.

C. REALISASI ANGGARAN/CAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Analisis akuntabilitas keuangan meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi. Dalam analisis ini pula diuraikan perkembangan kondisi pencapaian sasaran secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Tahun 2023, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut:

Dukungan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun semula sebesar Rp 41.398.890.944,00.

Berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun 2023, realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 41.068.839.694,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 3.614.959.071,00 mencapai 93,77%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.896.239.623,00 mencapai 98,47 dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp. 1.901.161.000,00 mencapai 100%. Hibah Keuangan kepada KPU dan Bawaslu sebesar 32.101.480.000,00 sebesar 100% Dan Bantuan Hibah Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 575.000.000,00 mencapai 95,83%.

Untuk realisasi program dan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.4

**Realisasi Anggaran per Indikator
Badan Kesbangpol Kab.Simalungun
Tahun 2023**

NO.	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	541.320.000	540.187.856	99,79%
2	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	1.901.161.000	1.901.161.000	100%

Tabel 3.5

**Capaian Kinerja Keuangan Badan Kesbangpol Kab.Simalungun
Tahun Anggaran
2023**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	RP	%
I.	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.850.995.889	6.254.929.994	5.951.010.838	95,14
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3.259.000	0	0	0
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.259.000	0	0	0
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.597.364.451	3.863.061.974	3.622.937.071	93,78

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**Tahun
2023**

1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.587.587.451	3.855.079.974	3.614.959.071	93,77
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.259.000	3.991.000	3.981.000	99,95
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan.Triwulan/Semesteran SKPD	3.259.000	3.991.000	3.981.000	99,95
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Asalisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.259.000	0	0	0
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.358.849.950	1.702.247.050	1.694.918.510	99,57
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	360.901.000	515.539.000	508.432.000	98,62
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	105.167.400	100.822.200	100.822.200	100
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.997.600	104.683.600	104.665.400	99,98
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.547.950	239.366.250	239.195.500	99,93
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	5.000.000	5.000.000	100
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	727.236.000	736.836,000	736.803.410	100
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.246.000	184.569.000	175.720.000	95,21
1.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.006.000	105.009.000	96.160.000	91,57
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	63.240.000	79.560.000	79.560.000	100
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.268.588	206.273.920	168.698.307	81,78
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.268.588	134.273.920	96.698.307	72,02
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.000.000	72.000.000	72.000.000	100
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.969.000	298.778.000	288.736.950	96,64
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.080.000	85.500.000	85.456.950	99,95
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.168.000	13.208.000	4.480.000	33,92

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**Tahun
2023**

1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.200.000	200.070.000	198.800.000	99,37
1.6.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	5.521.000	0	0	0
II.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.901.161.000	34.002.641.000	34.002.641.000	100
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	1.901.161.000	34.002.641.000	34.002.641.000	100
2.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.901.161.000	1.901.161.000	1.901.161.000	100
2.1.1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	0	32.101.480.000	32.101.480.000	100
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	600.000.000	600.000.000	575.000.000	95,83
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	600.000.000	600.000.000	575.000.000	95,83
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600.000.000	600.000.000	575.000.000	95,83
IV	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.000.000.000	541.320.000	540.187.856	99,79

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2023

4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.000.000.000	541.320.000	540.187.856	99,79
4.1.1	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	541.320.000	540.187.856	99,79
TOTAL BELANJA		10.093.117.989	41.398.890.944	41.068.839	99,20

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2023

No	Bagian/Bidang	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
1	Belanja Pegawai	3.855.079.974,-	3.614.959.071,-	93,77
2	Belanja Barang dan Jasa	2.941.169.970,-	2.896,239,623,-	98.47
3	Belanja Hibah	34.602.641.000,-	34.577.641.000,-	99,92
	Total	41.398.890.944,-	41.068.839.694,-	99,20

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 41.398.890.944,00 terealisasi sebesar Rp. 41.068.839.694,00 atau terserap 99,20%. Dari total pagu anggaran yang telah diterima oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun, dialokasikan untuk pendanaan pada 4 program yang terbagi dalam Sekretariat, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Penyerapan dana belanja langsung belum mencapai 100% disebabkan

- 1) adanya efisiensi penggunaan anggaran belum sesuai dengan kebutuhan
- 2) Efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan standar harga, dimana Standar harga di RKA aplikasi SIPD adalah standar harga tertinggi

2. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan dilakukan untuk menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya.

Analisis efektif menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes).

Dalam menjalankan kegiatan dan program selama tahun anggaran 2023 Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Simalungun menghadapi hambatan dan kendala baik secara administratif maupun keadaan di lapangan :

1. Minimnya realisasi anggaran dan kecilnya uang persediaan (UP) yang mengakibatkan tidak teralisasinya kegiatan.
2. Adanya gejala sikap dan prilaku warga masyarakat yang menggambarkan memudarnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, Falsafah Negara dan Pemersatu Bangsa.
3. Kerawanan-kerawanan sosial seperti tingginya angka (PEKAT) seperti narkoba, perjudian, prostitusi, miras dan sebagainya yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat.
4. Kemungkinan timbulnya huru-hara, baik sebagai akibat fenomena alam maupun akibat ulah manusia.
5. Kurangnya Kesadaran Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Simalungun dalam melaporkan Kegiatan yang dilakukan serta tidak memiliki sekretariat dan tidak memiliki papan nama.
6. Masih Kurangnya Kelengkapan Data Partai Politik dalam melengkapi Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang diterima.

**BAB IV
PENUTUP**

Demikian telah diuraikan pelaksanaan program/kegiatan yang diembankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun melalui APBD 2023 yang disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disajikan berdasarkan keadaan yang sebenarnya, dengan kesimpulan bahwa :

1. Anggaran belanja tahun 2023 yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun melalui anggaran belanja sebesar Rp. 41.398.890.944,- (Empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 41.068.839.694,- (Empat puluh satu miliar enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 99,20%.
2. Walaupun dana yang telah direalisasikan sebesar Rp. 41.068.839.694,- (Empat puluh satu miliar enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar (99,20%) telah mencapai Capaian Target Kinerja Program/Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun.
3. Sebahagian program Kegiatan dalam rangka melaksanakan misi-misinya yang ditujukan untuk mewujudkan Visinya yaitu Rakyat Harus Sejahtera, telah berhasil dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan baik, tanpa menemui masalah-masalah yang berarti.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 yang diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi peningkatan pencapaian program dan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Demikian LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun diperbuat sebagai bahan gambaran perkembangan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2023 dengan harapan dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam rangka pencapaian Good Governance di Kabupaten Simalungun.

Pamatangraya, .. Februari .. 2024
Kepala Badan Kesbang dan Politik
Kabupaten Simalungun,

Atipin Nainngolan, SH.
Sekretaris Utama Muda.
NIP. 196701181996101001.